

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal.

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya.

Akuntabilitas dinilai sangat penting dalam mewujudkan *good government*. Hal itu dilakukan melalui laporan keuangan yang telah diaudit secara profesional. Di kebanyakan negara berkembang, perhatian utama terhadap *good governance* dalam hubungan dengan penggunaan otoritas dan manajemen sektor publik, adalah korupsi yang cenderung menjadi karakter tipikal yang melekat.

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2016:13). Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Diketahui bahwa ada banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan; dan (4) dapat dipahami. (Mahmudi, 2016:11)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas atas LKPD belum mencapai harapan. Hal ini terlihat dari beberapa opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI yang masih mendapatkan opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat. Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dari tahun 2010-2014, ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Opini LKPD di Indonesia Tahun 2010-2014**

LKPD (Tahun)	OPINI								Jumlah
	WTP	Persentase	WDP	Persentase	TW	Persentase	TMP	Persentase	
2010	16	4%	254	64%	23	6%	103	26%	396
2011	36	9%	268	67%	6	2%	89	22%	399
2012	72	18%	256	64%	6	1%	67	17%	401
2013	105	26%	241	61%	11	3%	41	10%	398
2014	169	44%	188	50%	4	1%	18	5%	378

Sumber: IHPS I Tahun 2015, BPK RI

Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2010, dinyatakan bahwa terhadap 396 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 16 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 254 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 23 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 103 entitas. Perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2010 sampai tahun 2014 menunjukkan peningkatan kompetensi yang tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2010, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya kepada 16 entitas, tahun 2011 sebanyak 36 entitas, dan tahun 2012 sebanyak 72 entitas.

Sementara itu, terdapat 5 LKPD yang mengalami penurunan opini dari WDP ke TMP, yaitu Kabupaten Batu Bara (Sumatera Utara), Kabupaten Bangka Selatan (Kepulauan Bangka Belitung), Kabupaten Subang (Jawa Barat), Kabupaten Pandeglang (Banten), dan Kabupaten Bangka Selatan (Kepulauan Bangka Belitung).

Permasalahan itu terjadi karena entitas tidak menerapkan SAP seperti tahun sebelumnya. Ketidak sesuaian dengan SAP tersebut antara lain meliputi penyajian

asset dan belanja yang tidak didukung dengan bukti. Dan para pejabat atau pelaksana lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, dan kurang koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta adanya kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan. (IHPS I Tahun 2015)

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhann pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan penting pada organisasi pemerintah. Sumber daya manusia adalah pengelola dan memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Negara (Luh Kadek&Ni Luh Gede: 2015). Oleh karena itu, dalam organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan SDM yang kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak

terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Ketidak pahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam jabatan.

Hal ini sejalan dengan (Wahyono, 2004:12), menyatakan bahwa dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (keterandalan) disini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

Fenomena yang terjadi, laporan keuangan pemerintah daerah Kab. Subang pada tahun 2014 dan 2015 mendapatkan opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), penyebabnya pada tahun 2014 BPK menemukan indikasi penyimpangan keuangan daerah, atas penggunaan anggaran BPJS senilai Rp 40 miliar dan sistem pelaporan keuangan yang salah. Sedangkan pada LKPD tahun 2015 mendapatkan opini *disclaimer* disebabkan buruknya sistem administrasi pelaporan keuangan dan persoalan tatakelola (panatausahaan) asset dan administrasi pelaporan yang bermasalah. Selain itu menurut salah satu politisi partai Golkar, menyatakan bahwa ada sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) berkinerja buruk tidak memiliki perangkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, akibatnya berturut-turut mendapatkan opini *disclaimer* dari BPK. ([www.koran-sindo.com](http://www.koran-sindo.com))

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari pelaksanaan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah. (Mahmudi, 2016:20)

Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2016:27), menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Fenomena yang terjadi tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu SKAD mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, terutama dalam proses pencatatannya yaitu kurang baiknya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dilihat dari hasil pemeriksaan, bias jadi indikasi kurang kredibelnya pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2007 saja. Dari 24 laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa, tujuh diantaranya mendapatkann opini *disclaimer*, selebihnya 17 kabupeten/Kota yang lain mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, dalam hal ini dapat dilihat sebagai tindakan penyusunan LKPD yang

belum melalui prosedur akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, dan kurangnya keterbukaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. ([www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com))

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Andini dan Yusrawati (2015) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan)”.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan di dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga variable yang diteliti; variable independen (bebas) yaitu kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan untuk variable dependen (terikat) adalah kualitas laporan keuangan daerah. Peneliti melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan melalui perangkat kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dinas dengan unit analisis SDM/pegawai subagian keuangan/akuntansi disetiap dinas. Penentuan responden hanya pada 14SKPD dari 27SKPD yang ada di Kabupaten Empat Lawang. responden masing-masing diambil 3 pada setiap SKPD. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Perbedaan yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu (Dewi Andini dan Yusrawati, 2015) yaitu pada tempat penelitian dimana penulis melakukan penelitian

pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Subang dengan Perangkat Kuesioner tertutup. Selain itu yang membedakan dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 44 responden dengan menggunakan rumus slovin.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”**.

## **1.2 Identifikasi Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia pada BPKD Kabupaten Subang?
2. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada BPKD Kabupaten Subang?
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKD Kabupaten Subang?
4. Seberapa Besar Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKD Kabupaten Subang?

5. Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKD Kabupaten Subang?
6. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKD Kabupaten Subang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kompetensi Sumber Daya Manusia pada BPKD Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah pada BPKD Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKD Kabupaten Subang.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKD Kabupaten Subang.

5. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKD Kabupaten Subang.
6. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKD Kabupaten Subang.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Progran Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
  - b. Hasil penelitian ini daharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah Sistem Informasi Akuntansi.

c. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Bagi Instansi Pemerintah

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya di Kantor Pemerintahan Kabupaten Subang.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

## 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten subang. Serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten subang.

### **1.5 Tempat Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang. Jln. Dewi Sartika No. 2 Subang.